



MODUL  
TEMA 14

# Maju dalam Keragaman

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)  
PAKET C SETARA SMA/MA KELAS XII



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah  
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus  
Tahun 2020



MODUL  
TEMA 14

# Maju dalam Keragaman

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)  
PAKET C SETARA SMA/MA KELAS XII



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah  
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus  
Tahun 2020

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket C Setara SMA/MA Kelas XII  
Modul Tema 14 : Maju dalam Keragaman

- **Penulis:** R. Abdurrahkim Abubakar, S.Pd.; Euis Laelasari, M.M.Pd.
- **Editor:** Dr. Samto; Dr. Subi Sudarto  
Dra. Maria Listiyanti; Dra. Suci Paresti, M.Pd.; Apriyanti Wulandari, M.Pd.
- **Diterbitkan oleh:** Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus–Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

iv+ 48 hlm + ilustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

## Kata Pengantar

Pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif memberikan layanan kepada masyarakat yang karena kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi dan psikologis tidak berkesempatan mengikuti pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan formal. Kurikulum pendidikan kesetaraan dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah hasil revisi berdasarkan peraturan Mendikbud No.24 tahun 2016. Proses adaptasi kurikulum 2013 ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan adalah melalui proses kontekstualisasi dan fungsionalisasi dari masing-masing kompetensi dasar, sehingga peserta didik memahami makna dari setiap kompetensi yang dipelajari.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan prinsip flexible learning sesuai dengan karakteristik peserta didik kesetaraan. Penerapan prinsip pembelajaran tersebut menggunakan sistem pembelajaran modular dimana peserta didik memiliki kebebasan dalam penyelesaian tiap modul yang di sajikan. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah perlunya disusun modul pembelajaran pendidikan kesetaraan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dan melakukan evaluasi ketuntasan secara mandiri.

Tahun 2017 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengembangkan modul pembelajaran pendidikan kesetaraan dengan melibatkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru dan tutor pendidikan kesetaraan. Modul pendidikan kesetaraan disediakan mulai paket A tingkat kompetensi 2 (kelas 4 Paket A). Sedangkan untuk peserta didik Paket A usia sekolah, modul tingkat kompetensi 1 (Paket A setara SD kelas 1-3) menggunakan buku pelajaran Sekolah Dasar kelas 1-3, karena mereka masih memerlukan banyak bimbingan guru/tutor dan belum bisa belajar secara mandiri.

Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru, tutor pendidikan kesetaraan dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, 1 Juli 2020  
Plt. Direktur Jenderal



Hamid Muhammad

**Modul Dinamis:** Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Petunjuk Penggunaan Modul .....	1
Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul .....	2
Pengantar Modul .....	3
<b>UNIT 1. IKATAN YANG UTUH .....</b>	<b>4</b>
A. Hakikat Indonesia sebagai Negara Kesatuan .....	5
B. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia .....	7
Penugasan 1 .....	11
Latihan Soal 1 .....	12
<b>UNIT 2. BERSATU ITU INDAH .....</b>	<b>15</b>
A. Dinamika Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebelum Masa Kemerdekaan .....	15
B. Dinamika Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Setelah Masa Kemerdekaan .....	17
Penugasan 2 .....	35
Latihan Soal 2 .....	36
Rangkuman .....	39
Kunci Jawaban dan Rubrik Penilaian .....	40
Kriteria Pindah Modul .....	46
Saran Referensi .....	47
Daftar Pustaka .....	47
Biodata Penulis .....	48



## MAJU DALAM KERAGAMAN

### PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Kami sampaikan selamat berjumpa kepada Anda dengan materi **Modul 14** Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk Jenjang Pendidikan Kesetaraan Paket C, dengan judul **“Maju dalam Keragaman”**. Modul ini terbagi dalam 2 unit dengan beberapa materi sebagai berikut.

No	UNIT	MATERI	PENUGASAN
1	Ikatan Yang Utuh	A. Halikat Indonesia Sebagai Negara Kesatuan B. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia	Membuat cerita pendek tentang persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik
2	Bersatu Itu Indah	A. Dinamika Persatuan dan Kesatuan NKRI Sebelum Masa Kemerdekaan B. Dinamika Persatuan dan Kesatuan NKRI Setelah Masa Kemerdekaan	Membuat poster persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Anda akan mudah memahami modul ini dengan baik bila perhatikan petunjuk berikut:

1. Baca dengan sungguh-sungguh materi dalam modul mulai dari paparan awal sampai ke paparan akhir secara berurutan.
2. Kerjakanlah tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan langkah-langkah pengerjaannya.
3. Tugas-tugas dikumpulkan kepada Tutor untuk memperoleh klarifikasi kebenaran dalam mengerjakannya.
4. Kerjakan soal latihan yang terdapat pada bagian akhir modul untuk penilaian kompetensi terhadap Anda. Semua hasil kerja tugas-tugas dan penilaian kompetensi diserahkan kepada Tutor untuk memperoleh klarifikasi kebenaran dan penilaian.
5. Penilaian terhadap hasil belajar Anda digunakan untuk menentukan kriteria pindah modul/kriteria lulus dari modul ini.
6. Selamat belajar untuk Anda, dengan harapan menjadi Warga Negara Indonesia yang baik dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Tujuan Yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul

Kompetensi pembelajaran yang harus dikuasai oleh Anda di dalam modul ini mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Setelah mempelajari modul PPKn serta menyelesaikan penugasan yang ada di dalamnya diharapkan Anda memiliki :

1. Sikap dan perilaku dalam kehidupan keseharian yang proaktif dalam mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya dalam menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pemahaman dan kemampuan mengevaluasi dengan menunjukkan bukti-bukti dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bidang politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan
3. Keterampilan menyusun karya seni kreatif dengan tema persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bidang politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan.

## Pengantar Modul

Pernahkan anda melihat foto album foto kenangan keluarga anda? Foto apa saja yang biasanya disimpan dalam album kenangan? Mengapa kedua orang tua kita menyimpan foto album kenangan? Untuk apa?. Nah, untuk mengetahui jawabannya kita perlu bertanya kepada kedua orang tua kita. Secara umum kita akan mendapatkan jawaban bahwa foto dalam album kenangan merupakan bukti kenangan tentang perjalanan hidup dari sejak kecil sampai dewasa.

Album kenangan disimpan supaya kita bisa mengenang peristiwa-peristiwa pada saat senang, bahagia, maupun sedih yang dapat dijadikan bukti kepada anak cucu kita. Album foto kenangan juga bisa dijadikan sebagai semangat bagi kita untuk belajar dari kenangan masa lalu.

Bagaimana dengan bangsa kita? Apakah bangsa Indonesia mempunyai bukti-bukti dinamika perjuangan bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan? Tentu saja, kita sebagai bangsa yang besar mempunyai bukti-bukti sejarah, terlebih bukti-bukti terkait dengan bagaimana dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukti-bukti dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dapat digunakan sebagai penggugah semangat nasionalisme dan patriotisme bagi generasi muda.



sumber:/kebudayaan.kemdikbud.go.id

Gambar : Peran Tokoh masa Pergerakan Nasional

Untuk mengetahui bukti-bukti apa saja yang terdapat dalam dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita pelajari isi modul ini. Modul ini akan memberikan gambaran terkait penjelasan hakikat Indonesia sebagai negara kesatuan serta bukti-bukti dinamika persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan akhir dari modul ini diharapkan Anda dapat mengevaluasi dengan menunjukkan bukti-bukti terkait dengan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia diberbagai bidang.



Sumber : <https://mediaindonesia.com>

Gambar : Persatuan Bangsa, belajar dari sejarah

**P**erhatikanlah gambar di atas! Cermatilah kemudian analisislah apa makna dari gambar tersebut. Kalau kita cermati maka kita akan mendapatkan pesan bahwa gambar tersebut memberikan informasi tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bagi sebuah negara. Persatuan dan kesatuan merupakan modal utama yang menyebabkan negara menjadi kuat dan kokoh. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan, sebuah negara mustahil akan merdeka dan berkembang menjadi negara yang besar dan kuat.

Berbicara tentang negara tentu kita tidak bisa terlepas dari unsur-unsur pembentuk sebuah negara, seperti wilayah, rakyat, pemerintah dan pengakuan dari negara lain. Negara yang berdaulat tidak akan terbentuk jika salah satu unsur tidak terpenuhi. Unsur-unsur negara merupakan ikatan yang kuat dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena saling terikat dan berhubungan erat.

Kita patut bangga menjadi bangsa Indonesia dengan sumber kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan keberagaman masyarakat serta budayanya. Bagaimana tidak? Wilayah Indonesia yang luas serta terdiri atas beribu-ribu pulau-pulau dengan dibatasi wilayah perairan/laut membawa dampak keragaman dalam berbagai bidang kehidupan. Keragaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, kebiasaan hidup, kepercayaan, serta unsur budaya bukanlah menjadi penghalang untuk bersatu tetapi merupakan faktor yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Keragaman ini berpeluang memperkaya dan

memperkuat bangsa kita, tetapi jika tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan konflik, perpecahan, atau bahkan disintegrasi bangsa. Kita patut bersyukur bahwa bangsa Indonesia mempunyai semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* merupakan perekat persatuan dan kesatuan yang selalu bangsa Indonesia pegang teguh dalam kehidupan yang penuh dengan keberagaman pada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sebagai warga negara semangat perjuangan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan yang telah ada perlu tetap dijaga secara harmonis dan tiada henti untuk menjaga dan mempertahankan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Aku Bangsa Indonesia Tanah Airku” akan semakin memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan jika tertanam dalam benak semua warga negara.

Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya adalah dengan dimilikinya pemahaman terhadap hakikat dan karakteristik negara kesatuan, serta dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia oleh setiap warga negara. Untuk memberikan pemahaman tentang hakikat, karakteristik dan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam mempertahankan NKRI marilah kita pelajari materi modul berikut ini.

#### A. HAKIKAT INDONESIA SEBAGAI NEGARA KESATUAN

Coba cermati lingkungan di sekitar tempat anda tinggal! Anda pasti mengenal Ketua RT dan RW di lingkungan tempat tinggal Anda. Apa tugas mereka? Ketua RT dan RW mempunyai kewenangan mengatur kehidupan masyarakat yang berada dilingkungannya supaya kehidupan menjadi tertib berdasarkan peraturan yang berlaku. Sebagai warga masyarakat tugas kita adalah mentaati peraturan dan menghormati antara satu dengan lainnya sehingga suasana kehidupan menjadi nyaman tentram. Lingkungan RT dan RW merupakan lingkungan kecil dalam sebuah negara.

##### Apa itu negara?

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah, yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan di taati oleh rakyatnya. Logemann (Soehino.1998) menyatakan bahwa negara pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa. Negara memiliki kekuasaan memaksa dalam mengatur individu atau kelompok masyarakat supaya tujuan negara tercapai. Tujuan negara secara umum adalah menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Berkaitan dengan hal tersebut, negara mempunyai sifat yang melekat pada negara antara lain; sifat memaksa, sifat monopoli, dan sikap mencakup semua.

Tahukan anda ada berapa bentuk negara? Berdasarkan dari segi susunannya, bentuk negara dikelompokkan menjadi dua yaitu, negara yang bersusun tunggal dan negara

yang bersusun jamak. Negara yang bersusun tunggal disebut dengan negara kesatuan, sedangkan negara yang bersusun banyak disebut negara federasi (dalam sebuah negara terdapat negara-negara bagian).

Negara Kesatuan disebut juga sebagai negara unitaris atau negara tunggal, yang berarti negara yang tidak terdiri dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara sehingga tidak ada negara di dalam negara. Negara kesatuan hanya memiliki satu pemerintah yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam segala tataran pemerintahan. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut. Negara kesatuan merupakan negara yang berdaulat ke luar dan ke dalam dan kekuasaan untuk mengatur dan memimpin seluruh daerah berada pada pemerintah pusat.

Miriam Budiardjo menyatakan, bahwa negara kesatuan hanya ada satu pemerintah saja, dalam negara ini ikatan serta integrasi sangat kokoh. Dalam negara kesatuan tidak mengenal ada negara dalam negara, pemerintahan yang berdaulat hanya satu yakni pemerintah pusat. Kekuasaan yang ada di tangan pemerintah daerah merupakan mandat atau wewenang dari pusat, demikian juga berkaitan dengan peraturan perundangan, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional.

Negara kesatuan mempunyai 2 bentuk yaitu negara kesatuan yang menggunakan sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi menghendaki bahwa seluruh urusan negara langsung diatur dan dikendalikan oleh pemerintah pusat, sementara daerah hanya menjalankan peraturan-peraturan dan perintah dari pemerintah pusat tersebut. Sedangkan negara kasatuan dengan desentralisasi adalah pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang disebut daerah otonom. Hal ini disebut dengan otonomi daerah. Kedudukan pemerintah pusat dalam negara kesatuan dengan desentraisasi adalah tetap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, artinya daerah bertanggung jawab terhadap pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka kita akan tahu bahwa sebuah negara dikatakan negara kesatuan apabila memiliki ciri-ciri antara lain:

1. Kekuasaan tertinggi ada di Pemerintah Pusat
2. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang beraku di negara hanya satu
3. Tidak mengenal istilah negara bagian (tidak ada negara dalam negara).
4. Hanya ada satu kebijaksanaan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Bagaimana dengan bentuk negara Indonesia? Tentu saja kita sudah dapat menjawabnya bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang sering kali kita menyebutnya

dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilihan bentuk negara kesatuan sangat tepat, karena bangsa Indonesia mempunyai keragaman suku bangsa, agama dan budaya yang merupakan kekayaan yang harus dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia menganut negara kesatuan dengan asas desentralisasi dengan sistem otonomi daerah. Pemberian otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Terdapat klasifikasi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Ada beberapa urusan pemerintahan yang tidak diberikan kewenangan kepada daerah yaitu, urusan pemerintahan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tetap ada ditangan Pemerintah Pusat.

Setelah membaca dan memahami materi di atas, isilah tabel berikut untuk mengetahui keunggulan-keunggulan apa saja yang dimiliki Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia!

No	Dilihat dari	Keunggulan yang dimiliki
1	Wilayah Indonesia	
2	Keberagaman masyarakat	
3	Sumber kekayaan alam	

## B. KARAKTERISTIK NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sering disingkat menjadi NKRI. Menurut Konstitusi Negara Indonesia menganut bentuk negara kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, jelaslah bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik.

Tahukan anda bagaimana karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia? Untuk memahami karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu saja tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa. Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan hasil “Sumpah Pemuda” merupakan faktor pembentuk bangsa Indonesia dengan komitmen berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu yaitu Indonesia. Ikrar yang diucapkan oleh Pemuda-Pemuda dengan beragam latar belakang, budaya, suku dan bahasa menunjukkan bahwa kebulatan tekad untuk bersatu padu mengusir penjajah dari Indonesia serta merupakan salah satu tonggak sejarah bangsa Indonesia dalam mengawali kesadaran kebangsaan.

Sumpah Pemuda membuktikan, perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata dapat disatukan dan menjadi kuat dengan berpegang teguh kepada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti *“berbeda-beda tetapi tetap satu”*. Sumpah Pemuda menunjukkan bahwa tuntutan perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan semakin bulat, persatuan dan kesatuan menjadi inti penggerak perjuangan bangsa yang akan berpengaruh dalam alam pikiran bangsa Indonesia setelah merdeka.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 semakin mengokohkan berdirinya negara Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Bentuk negara kesatuan yang digunakan merupakan kesepakatan dan komitmen bersama dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Soepomo menyampaikan gagasan tentang bentuk negara kesatuan dengan paham negara integralistik, yaitu negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan–golongan dalam lapangan apapun. Hal ini juga didukung dengan pendapat dari Moh Yamin yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang bersifat unitaris.

Negara Kesatuan Republik adalah negara kepulauan yang berciri nusantara. Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah.. Pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Terkait dengan hubungan keuangan, pelayanan umum serta pemanfaatan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras. Hal ini menunjukkan semakin memperkokoh tekad bangsa Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagaimana dengan daerah yang memiliki kekhususan dan kesatuan masyarakat adat yang ada di Indonesia? Tentu saja, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus, bersifat istimewa, maupun kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Indonesia dalam negara kesatuan bertekad mewujudkan tujuan nasional sesuai dengan amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

*“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”*

PETA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA



Sumber: <https://indonesia.go.id/archipelago>

Gambar : Peta Indonesia

Perhatikanlah gambar di atas! Karakteristik Negara kesatuan Republik Indonesia yang lainnya dapat dilihat dari aspek kewilayahan dan kondisi sosial budaya masyarakat. Aspek kewilayahan ditunjukkan dengan negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau besar dan kecil. Pulau yang satu dengan pulau lainnya dipisahkan oleh bentangan laut yang sangat luas. Laut bukan menjadi pemisah antara satu pulau dengan pulau lainnya, tetapi menjadi penghubung dan pemersatu pulau-pulau di Indonesia. Negara Indonesia menjadi negara kesatuan walaupun berupa kepulauan.

Aspek sosial budaya masyarakat, bangsa Indonesia mempunyai keberagaman yang ditunjukkan dengan berbagai macam perbedaan, baik perbedaan suku, agama, kebudayaan, bahasa dan sebagainya. Dengan kondisi demikian, untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa maka dalam negara kesatuan diperlukan sebuah cara pandang atas kondisi bangsa dan negara yang disebut dengan wawasan nusantara. Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dengan tetap menghargai dan menghormati kebinnekaan di dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional Indonesia. Sehingga dikaitkan dengan negara kesatuan ancaman terhadap suatu wilayah atau pulau di Indonesia merupakan ancaman bagi negara Indonesia. Dikeluarkannya Deklarasi juanda pada tanggal 13 Desember 1957 semakin memperkokoh bahwa Indonesia merupakan kesatuan wilayah nusantara dengan laut sebagai pemersatu, bukan sebagai pemisah wilayah. Bentuk negara kesatuan sepakat untuk dipertahankan sejak awal berdirinya negara Indonesia karena dapat mawadahi persatuan dalam kondisi bangsa yang majemuk.

Setelah Anda mempelajari materi di atas, cermatilah dengan seksama lingkungan sekitar Anda. Bagaimana karakteristik persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar Anda? Untuk menjawab hal tersebut isilah tabel di bawah ini didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar lingkungan Anda!

No	Indikator	Kondisi yang ada di masyarakat	Kegiatan yang merupakan wujud persatuan dan kesatuan warga
1	Keberagaman mata pencaharian	.....	.....
2	Keberagaman tingkat ekonomi	.....	.....
3	Keberagaman asal daerah dan budaya	.....	.....
Berdasarkan uraian diatas berikanlah penjelasan :			
1.	Mengapa dalam hidup bermasyarakat diperlukan rasa persatuan dan kesatuan!	..... .....	
2.	Apa akibat yang akan muncul seandainya di dalam masyarakat tidak ada rasa persatuan dan kesatuan!	..... .....	
3.	Jelaskan karakteristik dari masyarakat yang mempunyai semangat persatuan dan kesatuan!	..... .....	

## PENUGASAN 1

- Buatlah sebuah cerita sederhana yang berisi tentang semangat generasi muda dalam upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cerita yang dituliskan tidak boleh mengandung unsur SARA dan ujaran kebencian. Cerita merupakan hasil ciptaan sendiri dan bukan ciptaan orang lain.
- Tujuan  
Setelah melaksanakan tugas mandiri Penugasan 1 ini, Anda diharapkan dapat memahami dan merasakan semangat persatuan dan kesatuan yang dimiliki yang dirasakan bangsa Indonesia dalam menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Media
  - Kertas Folio bergaris
  - Pensil
- Langkah-Langkah
  - Bacalah kembali uraian di atas tentang hakikat dan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - Renungkan kemudian buatlah sebuah cerita pendek yang bernuansa semangat generasi muda dalam upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - Setelah jadi cobalah baca kembali cerita yang dibuat, dengan penuh penghayatan.
  - Tuliskan pesan apa yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut terkait upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
  - Kerjakan dengan teliti.

## LATIHAN SOAL 1



### A. Pilihan Ganda

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda silang (x) pada jawaban yang benar!

- Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah....
  - Republik
  - Kesatuan
  - Presidensiil
  - Parlementer
  - Monarkhi
- Berikut ini yang bukan merupakan ciri negara kesatuan adalah.....
  - Kekuasaan tertinggi di tangan Pemerintah Pusat
  - Tidak ada negara dalam negara
  - Hanya ada satu Konstitusi/UUD yang berlaku
  - Kekuasaan pemerintah daerah tunduk pada pemerintah pusat
  - Setiap daerah mempunyai peraturan hukum sendiri-sendiri
- Negara kesatuan dimana seluruh urusan negara langsung diatur dan dikendalikan oleh pemerintah pusat disebut negara kesatuan dengan menggunakan sistem...
  - Sentralisasi
  - Konsentrasi
  - Dekonsentras
  - Desentarisasi
  - Otonomi Daerah
- Urusan pemerintahan pusat di Indonesia yang tidak diberikan kewewenangan kepada daerah adalah sebagai berikut, kecuali...
  - politik luar negeri
  - pertahanan dan keamanan
  - pendidikan dan kebudayaan
  - yustisi
  - moneter dan fiskal nasional
- Paham negara integralistik adalah yaitu negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan–golongan dalam lapangan apapun. Hal ini disampaikan oleh...
  - Ir Soekarno
  - Mohammad Yamin
  - Rajiman Widyodinigrat
  - Soepomo
  - Moh Hatta
- Pemerintah daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas .....
  - otonomi dan tugas pembantuan
  - desentralisasi dan dekonsentrasi
  - sentralisasi dan desentralisasi
  - otonomi dan sentralisasi
  - sentralisasi dan konsentrasi
- Pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan bukti bahwa penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi adalah.....
  - Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah
  - Pemerintah diberikan kebebasan untuk menyusun peraturan perundang-undangan tanpa mengacu kepada peraturan nasional
  - Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi
  - hubungan keuangan, pelayanan umum serta pemanfaatan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras
  - Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah
- Perhatikan pernyataan di bawah ini.
  - Kekuasaan tertinggi di tangan hukum
  - Mengakui kesatuan masyarakat hukum adat
  - Desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan
  - Laut sebagai pemersatu, bukan pemisah wilayah
  - Setiap daerah memiliki konstitusi

Berdasarkan pernyataan di atas, Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia ditunjukkan oleh nomor.....

- a. (1) ; (2) ; dan (3)
  - b. (1) ; (2) ; dan (4)
  - c. (1) ; (3) ; dan (5)
  - d. (2) ; (3) ; dan (4)
  - e. (2) ; (4) ; dan (5)
9. Dikeluarkannya Deklarasi juanda pada tanggal 13 Desember 1957 membawa dampak terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama pada wilayah Indonesia yaitu.....
- a. menjadi sangat luas dan disegani oleh bangsa lain
  - b. menjadi satu kesatuan dengan laut sebagai pemersatu.
  - c. menjadi tempat transit dan penghubung dua benua
  - d. kaya dengan kekayaan alam yang banyak dan melimpah
  - e. mempunyai angkatan laut yang disegani negara lain
10. Aspek sosial budaya masyarakat Indonesia ditunjukkan dengan berbagai macam perbedaan, baik perbedaan suku, agama, kebudayaan, bahasa dan sebagainya. Dengan kondisi demikian maka dalam negara kesatuan diperlukan sebuah cara pandang atas kondisi bangsa dan negara yang disebut.....
- a. ketahanan nasional
  - b. integrasi nasional
  - c. wawasan nusantara
  - d. paham integralistik
  - e. kewaspadaan nasional

## B. Soal Uraian

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Jelaskan hakikat dari Indonesia sebagai Negara Kesatuan!
2. Jelaskan bentuk negara kesatuan dengan negara federal! Berikan contohnya!
3. Sebutkan 3 ciri negara kesatuan! Jelaskan!
4. Sebutkan 3 ciri negara kesatuan republik Indonesia dengan sistem desentralisasi! Jelaskan!
5. Jelaskan dampak dikeluarkannya Deklarasi Juanda bagi persatuan dan keatuan bangsa Indonesia!

## UNIT 2

## BERSATU ITU INDAH



Sumber: <https://www.pngdownload.id/png-68slem/>

Gambar : Roda Mobil

**P**erhatikanlah gambar disamping! Kita semua pasti tahu gambar apakah itu. Tentu saja itu adalah roda mobil. Kalau kita perhatikan roda yang berputar, perputaran roda kadang kala ada saatnya di atas dan ada saatnya di bawah. Sama halnya dengan roda kehidupan yang selalu berputar, adakalanya kita merasa senang, dan adakalanya kita merasa susah.

Demikian juga dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat tertentu kondisi persatuan dan kesatuan bangsa dalam keadaan sangat kokoh, namun dalam

kondisi tertentu persatuan dan kesatuan bangsa goyah dan rapuh karena mendapatkan berbagai ancaman dan tantangan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah menunjukkan bahwa semua ancaman dan tantangan terhadap persatuan dan kesatuan di Negara Indonesia dapat dihadapi dan diselesaikan dengan baik, sehingga sampai saat ini dan seterusnya Negara Kesatuan republik Indonesia masih berdiri tegak.

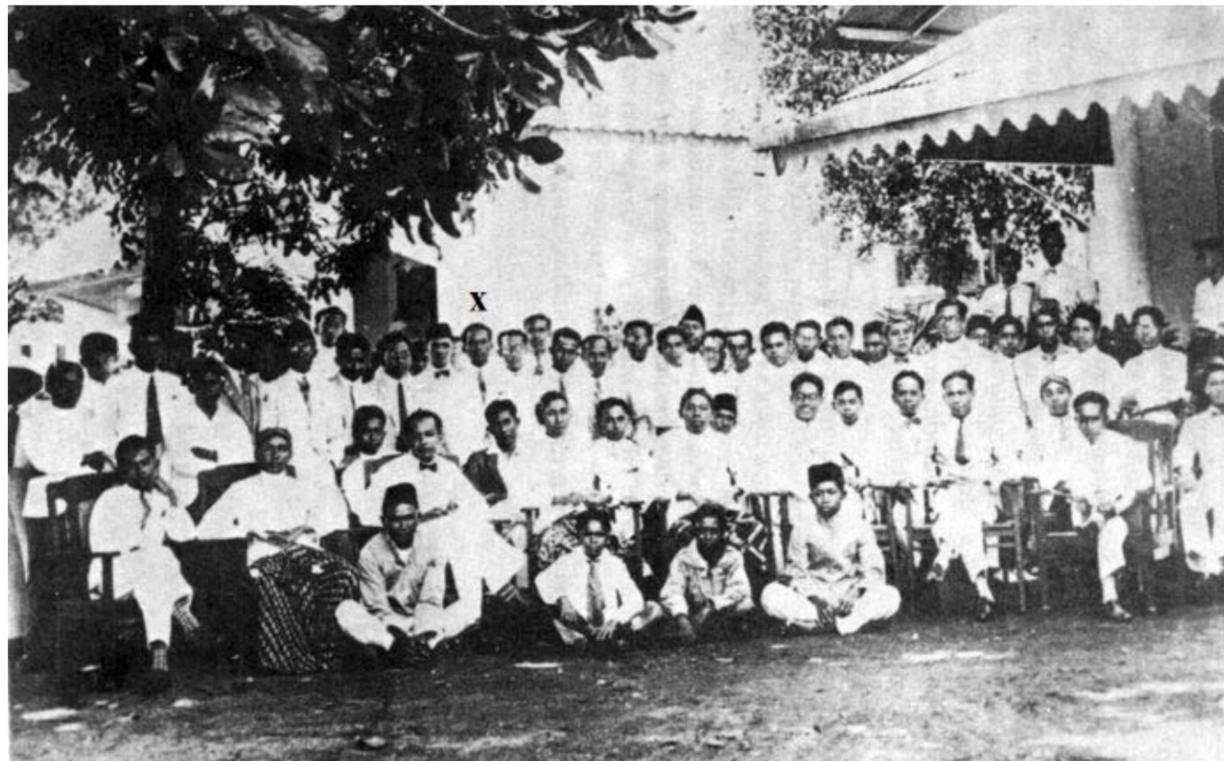
Untuk mendapatkan gambaran terkait dengan bagaimana dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam upaya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, marilah kita cermati uraian materi di bawah ini. Materi yang disampaikan di bawah difokuskan pada dinamika persatuan dan kesatuan pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan dalam bidang politik, pertahanan dan keamanan.

### A. Dinamika Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebelum Masa Kemerdekaan

Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia terbentuk melalui proses sejarah perjuangan bangsa yang panjang. Perasaan senasib, persamaan satu tujuan dan sepejuangan menjadi modal utama terwujudnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Bangsa Indonesia yang mendiami nusantara menyadari kemajemukan dan kebhinnekaan dalam hal suku, budaya, agama dan bahasa. Sejak masa

kerajaan Sriwijaya dan Majapahit telah ada upaya untuk mempersatukan nusantara belum berhasil karena masih belum dilaksanakan dalam konsep kebangsaan dan masih bersifat sendiri-sendiri.

Berdasarkan pengalaman sejarah tersebut, muncullah semangat kebangsaan kemudian lahir Kebangkitan Nasional pada tahun 1908 yang dipelopori oleh golongan pelajar. Konsep perlawanan terhadap penjajah sudah tidak berorientasi pada kedaerahan tetapi berubah menuju sistem organisasi yang merupakan perwujudan dari bentuk persatuan dan kesatuan. Kongres Pemuda dengan hasil Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 memperteguh sikap dan tekad dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, dengan tiga sendi persatuan Indonesia yaitu kesatuan bangsa, tanah air, dan bahasa yang kemudian akan menjadi dasar perjuangan bangsa Indonesia kedepan dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah.



Sumber : <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id>

Gambar : Peserta Kongres Pemuda Kedua 1928

Setelah peristiwa Sumpah Pemuda dikumandangkan ke seluruh penjuru nusantara proses kehidupan berbangsa dan bernegara semakin mantap dan kuat. Perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan mulai menampakkan hasilnya. Penjajah mulai menunjukkan kewalahan menghadapi perjuangan merebut kemerdekaan yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Hingga akhirnya secara nyata mulai dipersiapkanlah

kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Jepang melalui dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugas BPUPKI adalah mengkaji dan merumuskan Dasar Negara (Pancasila) dan Hukum Dasar (UUD NRI 1945) yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia.

Berita kekalahan Jepang setelah Hiroshima dan Nagasaki di bom atom oleh Sekutu merupakan semangat baru bagi perjuangan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan yang dibacakan oleh Ir Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan perwujudan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan sehingga menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bertekad mengupayakan tercapainya cita-cita dan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah disepakati bersama seperti yang tercantum Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian di atas, cobalah renungkan kembali bagaimana dinamika persatuan dan kesatuan dalam upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan dengan mengisi tabel di bawah ini!

Peristiwa Sejarah	Tekad dan semangat persatuan dan kesatuan yang muncul
Kebangkitan Nasional	1. .... 2. .... 3. ....
Sumpah Pemuda	1. .... 2. .... 3. ....
Sidang BPUPKI dalam merumuskan Dasar negara dan Hukum dasar	1. .... 2. .... 3. ....

### B. Dinamika Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Setelah Masa Kemerdekaan

Kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bukan merupakan akhir dari perjuangan bangsa Indonesia, tetapi merupakan awal langkah

untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih sesuai dengan dasar negara dan hukum dasar yang telah disepakati bersama. Tantangan yang dihadapi semakin besar. Disatu sisi bangsa kita harus menata sistem kehidupan ketatanegaraan dan kehidupan bernegara, tetapi disisi lain kita harus menghadapi Belanda yang tidak mengakui kemerdekaan bangsa kita. Belanda merasa bangsa Indonesia masih merupakan daerah jajahannya dan ingin tetap melanjutkan kekuasaannya terhadap bangsa Indonesia. Kondisi ini diperburuk lagi dengan munculnya berbagai gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari NKRI serta mengganti ideologi negara dengan ideologi lain. Kondisi dinamika persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah masa kemerdekaan, akan dipaparkan dalam materi berikut ini.

### 1. Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Tahun 1945 - 1949.

Periode ini dikenal juga dengan Masa Revolusi Kemerdekaan. Pada masa ini hukum dasar penyelenggaraan negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahannya adalah Republik. Sistem Pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan Presidensial dimana Presiden disamping berkedudukan sebagai kepala negara juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Presiden dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh para menteri. Pemegang kekuasaan tertinggi adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sedangkan Presiden merupakan mandataris MPR.

Pada Masa Revolusi Kemerdekaan ini (1945-1949) pelaksanaan pemerintahan belum dapat berjalan secara maksimal. Perhatian bangsa dan negara Indonesia lebih terfokus terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Sistem pemerintahan dan kelembagaan yang ditentukan dalam UUD 1945 belum dapat terbentuk dan berjalan dengan baik. Presiden dan Wakil Presiden untuk pertama kalinya dipilih oleh Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia. Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung terbentuk, maka untuk sementara waktu Presiden dan Wakil Presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). KNIP merupakan penjelmaan dari dari kebulatan tujuan dan cita-cita bangsa untuk menyelenggarakan kemerdekaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut undang-undang dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.



Sumber : <https://www.elshinta.com>

Gambar : Sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945

Terkait dengan aspek kewilayahan, hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 telah menetapkan pembagian wilayah Indonesia terbagi yang dalam 8 wilayah yang terdiri atas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Selain itu PPKI juga telah berhasil membentuk 12 Departemen dan 4 menteri negara pada masa revolusi kemerdekaan untuk pertama kalinya di Indonesia. Tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah kemudian mengeluarkan maklumat tentang Pembentukan Tentara Keamanan Rakyat yang nantinya akan menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Hal tersebut menunjukkan upaya-upaya perwujudan persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan republik Indonesia dalam sistem kenegaraan Indonesia.

Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dihadapkan pada keinginan Belanda untuk tetap menguasai Indonesia dan memasukkan kembali kedalam wilayah daerah jajahannya. Berbagai cara dilakukan mulai dari perundingan dan diplomasi internasional sampai dengan melaksanakan agresi militer. Perundingan Linggarjati, Renville, Roem Royen, dan Konferensi Meja Bundar dimanfaatkan oleh pihak Belanda untuk menunjukkan kepada dunia internasional supaya negara Indonesia tidak mendapat pengakuan Internasional. Bahkan Belanda sampai melaksanakan Agresi Militer I dan II untuk menunjukkan kepada dunia Internasional bahwa negara Indonesia sudah tidak ada lagi. Namun berkat kegigihan dan semangat nasionalisme, persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia, semua upaya Belanda dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia, bahkan negara Indonesia mendapatkan pengakuan dari dunia Internasional sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Bangsa Indonesia mempunyai kedudukan yang sejajar dengan bangsa lain.

Dinamika sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan setelah dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No X pada tanggal 16 Oktober 1945; Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945; dan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945. Maklumat Wakil Presiden No X pada tanggal 16 Oktober 1945 mengubah fungsi KNIP dari membantu tugas Presiden menjadi badan yang diserahkan kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan GBHN sebelum terbentuknya MPR, DPR, dan DPA. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945 pasal IV aturan peralihan yang menyatakan bahwa “sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional”.

Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 berisi tentang pembentukan partai politik. Dalam maklumat ini, rakyat diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mendirikan partai politik. Akibat dari maklumat tersebut mulailah bermunculan partai-partai politik pada masa itu. Kondisi ini menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang menganut asas negara demokratis. Kemudian pada tanggal 14 November 1945 Pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah yang mengakibatkan terjadinya perubahan sistem pertanggungjawaban menteri yang semula kepada Presiden berganti menjadi kepada Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Keluarnya maklumat pemerintah 14 November ini menyebabkan terjadinya perubahan sistem pemerintahan yang semula presidensiil menjadi sistem parlementer.

Diberlakukannya ketiga Maklumat di atas, membawa dampak kehidupan kenegaraan yang baru dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Perubahan sistem presidensiil menjadi parlementer menyebabkan terbentuknya sejumlah kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Kabinet yang terbentuk pada masa revolusi kemerdekaan antara lain Kabinet Syahrir I (2 September 1945-14 November 1945); Kabinet Syahrir II (12 Maret 1946-20 Oktober 1946) ; Kabinet Syahrir III (20 Oktober 1946-27 Juni 1947) ; Kabinet Amir Syarifuddin I ( 3 Juli 1947-11 November 1947 ); Kabinet Amir Syarifuddin II (11 November 1947-29 Januari 1948); Kabinet Hatta I (29 Januari 1948-4 Agustus 1948); Kabinet Darurat (PDRI) (19 Desember 1948-13 Juli 1949) ; Kabinet Hatta II (4 Agustus 1949-20 Agustus 1949)

Disamping dinamika persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia dalam bidang politik (sistem pemerintahan), dalam bidang pertahanan dan keamanan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara dari rongrongan

yang berasal dari dalam yaitu munculnya pemberontakan atau gerakan separatis yang bertujuan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun mengganti ideologi negara dengan ideologi baru. Pemberontakan yang terjadi dan dihadapi oleh bangsa Indonesia antara lain Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1948 di Madiun yang dipimpin oleh Muso dan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) tahun 1949 di Jawa Barat yang dipimpin Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo.

Pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948 dipimpin oleh Muso dengan mempunyai tujuan mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis. Pemberontakan PKI Madiun ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. PKI dalam mencapai tujuannya melakukan penganiayaan fisik, penculikan dan pembunuhan terhadap pejabat maupun warga yang anti PKI, serta mengadu domba kesatuan TNI. Pemberontakan PKI Madiun akhirnya berhasil ditumpas dalam operasi militer oleh TNI di bawah pimpinan Kolonel Gatot Soebroto dan Kolonel Sungkono dengan mendapat dukungan dari rakyat. Upaya pengejaran dan pembersihan terhadap pemberontakan PKI Madiun dilakukan hingga ke daerah-daerah. Akhirnya Muso berhasil di tembak mati di tempat persembunyiannya.

Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat yang dipimpin Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo bertujuan mendirikan Negara Islam Indonesia. Untuk mengatasi pemberontakan DI/TII dilakukan operasi militer oleh TNI. DI/TII di Jawa Barat berhasil ditumpas menggunakan Operasi Pagar Betis dan Operasi Baratayudha oleh Divisi Siliwangi. Pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil di tangkap di Gunung Geber. Tertangkapnya Kartosuwiryo ini mengakhiri pemberontakan DI/TII di Jawa Barat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa dinamika persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia masa revolusi kemerdekaan (1945-1949) sudah mengkrystal dan tertanam kuat. Hal ini ditunjukkan dengan semangat yang ditunjukkan oleh pemerintah dan seluruh komponen rakyat Indonesia dalam perjuangan melawan penjajah untuk mempertahankan kemerdekaan dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu komitmen persatuan dan kesatuan terlihat dengan dukungan rakyat terhadap TNI dalam menumpas setiap pemberontakan yang ingin merongrong dan membubarkan negara Indonesia.

## 2. Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Tahun 1949 - 1959.

Hasil Konferensi Meja Bundar membawa perubahan besar terhadap bentuk negara Indonesia, dari negara kesatuan menjadi negara serikat yang penyelenggaraan sistem ketatanegaraan didasarkan pada Konstitusi RIS. Sistem pemerintahan yang dianut

adalah sistem parlementer dimana kekuasaan pemerintahan sepenuhnya dipegang oleh kabinet di bawah perdana menteri dan presiden hanya sebagai kepala negara. Republik Indonesia Serikat berdasarkan desakan oleh rakyat Indonesia akhirnya dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950 karena bentuk negara serikat atau federal tidak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia bahkan cenderung untuk memudahkan bangsa Indonesia di pecah belah. Muncul reaksi dari bangsa Indonesia agar bentuk negara dikembalikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara-negara RIS akhirnya menggabungkan diri dengan Negara Republik Indonesia dengan kesepakatan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Pembubaran Republik Indonesia Serikat membawa kembali bangsa Indonesia kepada bentuk Negara Kesatuan dengan konstitusi yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 adalah UUDS 1950. Bentuk pemerintahan yang digunakan adalah Republik dengan sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer dimana dalam melaksanakan tugasnya kabinet bertanggung jawab kepada DPR. Presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara, dan menjadi bagian dari pemerintahan, sedangkan pelaksanaan pemerintahan menjadi tanggung jawab menteri dan perdana menteri. Lima alat kelengkapan lembaga negara yang terbentuk dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sesuai dengan UUDS 1950 adalah Presiden, menteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan.

Pelaksanaan sistem pemerintahan pada masa UUDS 1950 membawa nilai lebih bagi pelaksanaan pemerintahan pada masa itu. Nilai lebih berjalannya sistem pemerintahan yang terjadi pada masa itu antara lain adanya kebebasan pers dan berfungsinya badan peradilan, Indonesia mendapatkan tempat dan nama baik di dunia internasional dengan telah berhasilnya melaksanakan Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955, keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 1955, serta keberhasilan penumpasan pemberontakan yang terjadi pada masa tersebut.

Disamping nilai lebih, pelaksanaan sistem pemerintahan parlementer yang dilaksanakan pada masa UUDS 1950 juga menimbulkan dampak negatif terhadap dalam perjalanan sistem pemerintahan pada saat itu. Dalam sistem parlementer pemerintah (kabinet) sangat tergantung kepada dukungan partai-partai dalam parlemen. Kondisi ini sering menyebabkan terjadinya pergantian kabinet. Pergantian silih berganti kabinet dalam jangka waktu yang tidak lama menyebabkan banyak kebijakan maupun program kerja pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik. Perhatikan tabel tentang kurun waktu kabinet yang terbentuk tahun 1950-1959 di bawah ini

No	Kabinet	Periode	Waktu (kurang lebih)
1	Kabinet Natsir	6 September 1950 – 27 April 1951	8 bulan
2	Kabinet Sukirman	27 April 1951 – 3 April 1952	1 tahun
3	Kabinet Wilopo	3 April 1952–30 Juli 1953	1 tahun 6 bulan
4	Kabinet Ali Sastroamidjojo I	30 Juli 1953–12 Agustus 1955	2 tahun 1 bulan
5	Kabinet Burhanudin Harahap	12 Agustus 1955–24 Maret 1956	8 bulan
6	Kabinet Ali Sastroamidjojo II	24 Maret 1956–9 April 1957	1 tahun 1 bulan
7	Kabinet Djuanda	9 April 1957–10 Juli 1959.	2 tahun 3 bulan

Sementara itu perpecahan antar daerah dan pertentangan antara partai politik tidak dapat dielakkan. Wakil rakyat yang duduk dalam parlemen pada hakikatnya adalah wakil-wakil partai yang belum mencerminkan dukungan yang nyata dari para pemilih. Hal ini menuntut rakyat Indonesia meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum. Diharapkan dengan pemilihan umum akan dapat mengakhiri ketidakstabilan politik dan terbentuknya pemerintahan yang stabil dan kuat serta program-program yang telah dirancang tiap-tiap kabinet dapat dilaksanakan dengan baik.



Sumber: [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum)  
Gambar : Poster Kampanye Pemilu 1955

Tanggal 29 September 1955 akhirnya dilaksanakanlah pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk pemilihan konstituante. Pemilihan umum pada masa ini dalam sejarah bangsa Indonesia adalah pemilihan umum yang pertama. Rakyat Indonesia menunjukkan kedewasaan dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang dibuktikan dengan partisipasi rakyat Indonesia sedmikian besar dan menunjukkan kesadaran politik rakyat.

Dinamika persatuan dan kesatuan pada masa ini diwarnai dengan beberapa peristiwa yang menyebabkan kondisi negara mengalami kekacauan. Terjadinya ketegangan sosial politik dalam pemerintahan menyebabkan stabilitas negara mulai goyah. Tidak berjalannya program kerja kabinet karena pergantian kabinet yang cepat terjadi, kegagalan badan konstituante dalam melaksanakan tugasnya untuk menetapkan UUD, serta munculnya beberapa pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI menyebabkan menjadi kondisi negara semakin rapuh.

Pada tahun 1949 – 1959 sejumlah pemberontakan terjadi di daerah-daerah Republik Indonesia dengan tujuan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan. Namun dengan kebulatan tekad mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan dengan kerjasama antara TNI dan rakyat Indonesia akhirnya pemberontakan tersebut dapat ditumpas. Pemberontakan tersebut antara lain:

Pemberontakan Angkatan Ratu Perang Adil (APRA) yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling pada tanggal 23 Januari 1950 bertujuan mempertahankan bentuk negara Serikat dan Negara Federal Pasundan di Indonesia serta menuntut setiap negara bagian Republik Indonesia Serikat mempunyai tentara sendiri. Pemberontakan APRA melakukan pembunuhan terhadap setiap tentara Indonesia yang ditemui, bahkan menyerang Markas Divisi Siliwangi di Bandung. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas dengan operasi militer yang dilakukan oleh Pasukan Divisi Siliwangi.

Pada tahun yang sama, di Sulawesi Selatan juga terjadi pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan ini terjadi karena kelompok Andi Aziz menolak masuknya pasukan-pasukan APRIS/TNI serta bertujuan untuk mempertahankan keutuhan Negara Indonesia Timur. Untuk menghentikan pemberontakan tersebut, pemerintah pada 8 April 1950 mengeluarkan ultimatum yang isinya memerintahkan kepada Andi Aziz agar melaporkan diri serta mempertanggungjawabkan perbuatannya ke Jakarta dalam waktu 4 x 24 jam. Andi Aziz juga diperintahkan untuk menarik pasukan, menyerahkan semua senjata, dan membebaskan tawanan. Andi Aziz akhirnya ditangkap dan diadili di Jakarta.

Tahun 1950, di Maluku terjadi Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) yang dipimpin oleh Mr. Dr. Soumokil dengan tujuan memisahkan diri dengan Negara Republik Indonesia dan ingin mendirikan negara sendiri yang diberi nama Republik

Maluku Selatan. RMS juga menolak kedatangan APRIS/TNI yang hendak datang ke Maluku untuk melucuti senjata bekas Tentara KNIL. Pemberontakan ini akhirnya berhasil ditumpas oleh ekspedisi militer dibawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Dr. Soumokil akhirnya dapat ditangkap dan kemudian dihadapkan pada Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta. Berdasarkan keputusan Mahkamah Militer Luar Biasa, Dr. Soumokil akhirnya dijatuhi hukuman mati.

Pemberontakan berikutnya yang terjadi adalah pemberontakan DI/TII yang dipimpin oleh Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, DI/TII yang dipimpin oleh Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Kedua pemberontakan tersebut akhirnya dapat ditumpas oleh TNI bersama rakyat. Kahar Muzakar berhasil ditembak mati sedangkan Ibnu Hajar dan anak buahnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.

Di Sulawesi terjadi Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Rakyat Semesta atau yang sering disebut PRRI/Semesta. Dewan Banteng di bawah Letnan Kolonel Ahmad Husein memberikan ultimatum kepada pemerintah menuntut Kabinet Juanda mundur dari jabatannya. Karena tidak dipenuhi pemerintah maka Letnan Kolonel Ahmad Husein melakukan operasi militer. Akhirnya PRRI/ Semesta dihancurkan dan dilumpuhkan dengan Operasi 17 Agustus dan Operasi Sapta Marga.



Sumber : <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/>

Gambar : Dekrit presiden 5 Juli 1959

Melihat kondisi negara yang dalam keadaan kacau dan tidak menentu karena terjadinya pemberontakan di daerah, kegagalan badan konstituante dalam menjalankan tugasnya, dan desakan untuk kembali ke UUD 1945, Presiden Sukarno akhirnya mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden maka berakhir masa sistem pemerintahan parlementer di Indonesia. Adapun isi Dekrit 5 Juli 1959 adalah;

1. Menetapkan pembubaran Konstituante
2. Menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950
3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tahun 1949 – 1959 mengalami banyak sekali tantangan bahkan dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Namun kita perlu bersyukur karena semangat persatuan dan kesatuan yang ditunjukkan oleh bangsa Indonesia dapat menyelesaikan dan menghadapi semua tantangan yang terjadi dengan tetap tegak berdirinya negara kesatuan republik Indonesia.

### 3. Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Tahun 1959 - 1966.

Kondisi negara Indonesia yang kacau dan tidak pasti, serta kegagalan badan konstituante dalam melaksanakan tugasnya menjadi latar belakang dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Hal ini membawa kepada diberlakukannya kembali UUD 1945 sebagai dasar pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Sistem pemerintahan menjadi sistem presidensiil, dengan presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.

Kabinet Juanda mengembalikan mandat kepada Presiden Sukarno dan membubarkan kabinet karya sehari setelah dikeluarkannya dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada tanggal 10 Juli 1950 Presiden Soekarno membentuk kabinet baru yang disebut dengan kabinet kerja. Kabinet kerja dipimpin oleh Soekarno sebagai Perdana menteri dengan dibantu oleh Djuanda sebagai menteri pertama dan dua orang wakil yaitu dr. Leimena dan dr. Subandrio. Kabinet kerja disebut juga kabinet non partai karena tidak melibatkan partai besar yang ada pada saat itu. Program kabinet kerja antara lain penyelenggaraan keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Barat, dan melengkapi sandang pangan rakyat.



Sumber : <https://www.kompas.com/>

Gambar : Presiden Soekarno menyampaikan Pidato kenegaraan pada peringatan lima tahun Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1950

Melihat pengalaman sejarah terkait dengan pelaksanaan demokrasi liberal yang telah lalu, Presiden Soekarno kemudian mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Konsep awal demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang berdasarkan pada sila keempat Pancasila yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Namun dalam pelaksanaannya menjadi bergeser menjadi dipimpin oleh Presiden.

Pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam praktiknya banyak yang tidak sesuai/ menyimpang dari dasar negara (Pancasila) dan hukum dasar (UUD 1945) di Indonesia. Penyimpangan yang terjadi selama pelaksanaan demokrasi terpimpin antara lain:

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dibentuk melalui penunjukan dan pengangkatan oleh Presiden melalui Penetapan Presiden No. 2/1959 tanggal 31 Desember 1959, tidak melalui pemilihan umum sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945.
- b. Tahun 1960 Presiden membubarkan DPR karena menolak Rencana Anggaran Belanja Negara dan menggantinya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau yang sering disebut DPRGR. Kedudukan DPRGR adalah membantu tugas Presiden.
- c. Pimpinan MPRS, DPRGR, DPA, dan Mahkamah Agung yang seharusnya mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Presiden ditempatkan sebagai menteri dan berada di bawah Presiden.

- d. Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup yang ditetapkan dengan Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963.
- e. Pembentukan Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme).

Pembentukan Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis) ini membuat Partai Komunis Indonesia mendapatkan peluang dan dukungan untuk memperbesar pengaruhnya di Indonesia. Setelah merasa kuat, PKI melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Gerakan 30S/PKI pada tanggal 30 September 1965 dengan tujuan merebut kekuasaan pemerintah yang sah dengan melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 7 Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat. Pemberontakan G30S/PKI akhirnya dapat digagalkan berkat kewaspadaan dan kesiapan TNI dengan dukungan kekuatan rakyat Indonesia. Rakyat kemudian menghendaki PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia. Tuntutan rakyat tersebut kemudian dicetuskan dalam Tritura "Tri Tuntutan Rakyat" yang artinya tiga tuntutan rakyat yaitu:

- a. Bubarkan PKI
- b. Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI
- c. Turunkan harga/perbaiki ekonomi.

#### 4. Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Tahun 1966 - 1998.

Tuntutan rakyat yang dituangkan dalam Tritura membawa arah baru dalam pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Tahun 1966 masa demokrasi terpimpin yang sering disebut dengan Orde Lama telah berakhir dan digantikan dengan masa Orde Baru di bawah Presiden Suharto. Masa Orde Baru tetap menggunakan sistem pemerintahan presidensiil. Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh Presiden dengan dibantu para menteri.

Pemerintahan orde baru bertujuan untuk mengoreksi segala penyimpangan yang terjadi pada masa orde lama. Penataan kembali segala aspek kehidupan bangsa dan negara serta menjalankan secara konsisten Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir adalah menyusun kembali kekuatan negara dalam menumbuhkan stabilitas nasional dengan maksud agar mempercepat pembangunan nasional.

Orde Baru mulai melaksanakan konsep pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan I pada tanggal 6 Juni 1968. Tugas kabinet pembangunan I adalah melaksanakan Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I, yang kemudian akan menjadi rangkaian pembangunan lima tahun berikutnya untuk mencapai sasaran Pembangunan Panjang Panjang tahap I.



Sumber : <https://id.wikipedia.org>  
Gambar : Kabinet pembangunan I

Pemilihan umum dilaksanakan dengan mekanisme setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum pertama tahun 1971 telah berhasil menyusun keanggotaan badan-badan legislatif di tingkat daerah dan pusat. Pemilihan umum terakhir masa orde baru dilaksanakan pada tahun 1997.

Prioritas pembangunan yang dilakukan adalah bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional akan terbentuk jika kondisi negara dalam keadaan aman dan terbebas dari gangguan gerakan yang merongrong pemerintahan. Penekanan pendekatan keamanan menjadi prioritas dalam mewujudkan pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Setiap tindakan yang membahayakan stabilitas nasional akan ditindak dengan tegas, karena pembangunan ekonomi tidak akan berjalan baik jika keamanan terganggu sehingga berdampak pada pembangunan nasional tidak akan berhasil.

Tujuan nasional bangsa Indonesia ditempuh melalui pembangunan nasional secara berencana dan bertahap. Pembangunan jangka panjang yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 1997 telah menunjukkan hasil yang dapat dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia, antara lain: meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat Indonesia; pelaksanaan gerakan wajib belajar dan gerakan nasional orang tua asuh; kebutuhan pangan tercukupi dengan swasembada pangan; terlaksananya rencana pembangunan lima tahun ; dan semakin banyak rakyat yang pintar membaca dan menulis, sehingga tingkat pengangguran berkurang; suksesnya program transmigrasi dan keluarga berencana.

Penyimpangan pada masa orde baru terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya kedudukan Presiden mempunyai kendali sangat besar terhadap lembaga negara yang lain sehingga memiliki kekuasaan yang tidak terkontrol yang akhirnya

menyebabkan munculnya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme; adanya pembatasan hak-hak politik rakyat seperti pembatasan jumlah partai politik, kebebasan pers dikekang; pembangunan ekonomi bersifat sentralistik; supremasi hukum tidak dapat dijalankan dengan baik.

Tahun 1998 terjadi krisis moneter dan ekonomi yang dihadapi semua bangsa. Krisis ini akhirnya berkembang meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara mulai politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Munculnya gerakan reformasi menginginkan adanya pergantian pemerintah orde baru. Tanggal 21 Mei 1998 Presiden Suharto kemudian menyatakan mengundurkan diri sebagai Presiden dan kemudian digantikan oleh BJ Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden.

### 5. Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Tahun 1998 – sekarang

Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Tahun 1998 – sekarang disebut juga dengan masa reformasi. Reformasi adalah suatu perubahan kehidupan lama yang berganti menuju kearah tatanan perikehidupan baru yang secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 ditandai dengan tuntutan dilaksanakannya koreksi total di berbagai disegala aspek kehidupan, dilaksanakannya prinsip-prinsip demokrasi, penegakan kebenaran dan keadilan berdasarkan hukum dan keterbukaan.

Dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Pokok.Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara memberikan arah bagi Kabinet Reformasi Pembangunan dalam menanggulangi krisis dan melaksanakan reformasi menyeluruh dengan tujuan terbangunnya sistem kenegaraan yang demokratis serta dihormati dan ditegakkannya hukum untuk mewujudkan tertib sosial masyarakat. Ketetapan MPR ini merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan pembaharuan di segala bidang pembangunan nasional, terutama bidang-bidang ekonomi, politik, hukum, serta agama dan sosial budaya.

Ketetapan MPR ini, bertujuan mengatasi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya, mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui perluasan dan peningkatan partisipasi politik rakyat secara tertib untuk menciptakan stabilitas nasional, menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Hak Asasi Manusia menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental, dan meletakkan dasar-dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan agarrra dan sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat madani.

Agenda reformasi yang dijalankan dalam berbagai bidang kehidupan dapat dilihat pada tabel di bawah ini!

Bidang Hukum	Bidang Politik
Tujuan : untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum	Tujuan : usaha penegakan kedaulatan rakyat sebagai jalan pemecahan krisis nasional di segala bidang dengan skala prioritas.
Dilakukan dengan cara: 1. Pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif. 2. Mewujudkan sistem hukum nasional melalui program legislasi nasional secara terpadu. 3. Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 4. Terbentuknya sikap dan perilaku anggota masyarakat termasuk para penyelenggara negara yang menghormati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.	Dilakukan dengan cara: 1. Menegakkan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan peranan pengawasan oleh lembaga negara, lembaga politik dan kemasyarakatan. 2. Menghormati keberagaman asas acauci, aspirasi, dan program organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan Pancasila. 3. Pembagian secara tegas wewenang kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 4. Menyesuaikan implementasi Dwi Fungsi ABRI dengan paradigma baru peran ABRI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Bidang Ekonomi	Bidang Agama dan Sosial Budaya
Tujuannya : mendukung upaya penanggulangan krisis.	Tujuan : untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang sosial budaya.
Dilakukan dengan cara: 1. Mewujudkan kebijakan ekonomi makro dan mikro yang transparan.	Dilakukan dengan cara: 1. Menyiapkan sarana dan prasarana, progrirm aksi dan perundang-undangan bagi tumbuh dan tegaknya etika usah4 etika profesi, dan etika pemerintahan.
Bidang Ekonomi	Bidang Agama dan Sosial Budaya

- |  |   |
|--|---|
| <p>2. Membenahi lembaga keuangan terutama sektor perbankan.</p> <p>3. Membuat perekonomian lebih efisien dan kompetitif dengan menghilangkan berbagai praktek monopoli serta mengembangkan sistem insentif yang mendorong efisiensi dan inovasi</p> <p>4. Meningkatkan keterbukaan pemerintah dalam pengelolaan usaha untuk menghilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta praktek-praktek ekonomi lainnya yang merugikan negara dan rakyat.</p> <p>5. Melaksanakan deregulasi ketetapan-ketetapan yang menghambat investasi, produksi, distribusi, dan perdagangan</p> <p>6. Menyelenggarakan otonomi daerah, pengaturan, pembagiaq dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pertimbangan keuangan pusat- dan daerah, segera dilakukan melalui pembentukan dan perubahan UndIS Undang.</p> <p>7. Membentuk sistem pengawasan dan pemantauan utang luar negeri baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun dunia usaha</p> | <p>2. Menyiapkan sarana dan prasarana serta program aksi bagi tumbuhnya suasana yang sehat, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.</p> <p>3. Menyiapkan sarana dan prasarana serta melakukan kampanye untuk membentuk visi bersama tentang Indonesia masa depan.</p> <p>4. Menciptakan jaring tim kerja nasional antar golongan masyarakat dan lintas sektoral yang tersebar pada pusat-pusat pertumbuhan daerah untuk menghindari kerancuan tentang polaksanaan agenda-agenda pembangunan.</p> <p>5. Melaksanakan reformasi sikap mental bangsa dengan membangun jaring institusi budaya yang berwawasan kebangsaan, mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati serta menegakkan hukum</p> <p>6. Membangun institusi penduduk lanjut usia untuk menjaga harkat . dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya.</p> <p>7. Pembinaan kerukunan antar umat beragama serta pembentukan dan pemberdayaan jaringan kerja antar umat beragama.</p> <p>8. Meningkatkan pembangunan akhlak mulia dan moral luhur masyarakat melalui pendidikan agama bagi masyarakat dan usaha sungguh-sungguh untuk mencegah dan menangkal setiap usaha dan kegiatan yang dapat mendorong dan menumbuhkan akhlak yang tidak terpuji di kalangan masyarakat maupun yang dipublikasikan melalui media massa</p> |
|--|---|

Untuk melaksanakan agenda sesuai dengan TAP MPR tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pelaksanaan amandemen UUD 1945 , dengan kesepakatan bersama antara lain: Pembukaan UUD 1945 tidak dirubah, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap dipertahankan, dan penjelasan terhadap sistem pemerintahan presidensial. Pada tahun 1999 sampai dengan 2002, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah diamandemen 4 kali. Amandemen I UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sidang Umum MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999, Amandemen II UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sidang Umum MPR 2000 tanggal 7-8 Agustus 2000, Amandemen III UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sidang Umum MPR 2001 tanggal 1-9 November 2001, dan Amandemen IV UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sidang Umum MPR 2002 tanggal 1-11 Agustus 2002.



Sumber : <https://tirto.id/amandemen-uud-1945>

Gambar : Sidang Paripurna MPR Tahun 2002 dalam Amandemen UUD 1945

Beberapa perubahan yang terjadi antara lain dalam amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain: (1) pembatasan kewenangan presiden seperti penghapusan kekuasaan presiden untuk membentuk UU, pengangkatan dan penerimaan duta harus melalui pertimbangan DPR, pemberian grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan MA, pemberian amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. . (2) pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, dimana presiden dan wakli presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Selama pelaksanaan masa reformasi sampai sekarang telah dilaksanakan pergantian presiden antara lain; Presiden BJ Habibie (1998-1999) ; Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001); Presiden Megawati Soekarno Putri (2001-2004); Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat Presiden selama dua masa jabatan (2004-2009 dan 2009-2014); dan Presiden Joko Widodo yang menjabat Presiden selama dua masa jabatan (2014-2019 dan 2019-sampai sekarang).

Semangat bangsa Indonesia yang ditunjukkan dalam dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam memperkokoh tegaknya NKRI, perlu kita teladani dan kita laksanakan sebagai warga negara di masa sekarang. Wujud nyata yang dapat dilakukan dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah dengan menampilkan sikap positif terkait dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Coba anda tuliskan perilaku positif apa saja yang dapat kita lakukan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka tegaknya NKRI. Tuliskan jawaban anda pada tabel di bawah ini!

No	Lingkungan	Sikap/Perilaku positif yang ditunjukkan dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa
1	Keluarga	
2	Masyarakat sekitar	
3	Bangsa dan negara	

## PENUGASAN 2

1. Buatlah sebuah poster dengan tema persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bidang politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan.
2. Tujuan  
Setelah melaksanakan tugas mandiri Penugasan 2 ini, Anda diharapkan dapat mempunyai sikap dan pemahaman tentang semangat persatuan dan kesatuan yang dimiliki dan dirasakan oleh bangsa Indonesia dalam menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bidang politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan.
3. Media
  - a. Kertas Folio bergaris
  - b. Pensil
  - c. Pensil berwarna, spidol atau pewarna lainnya.
4. Langkah-Langkah
  - a. Bacalah kembali uraian di atas tentang bukti-bukti persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
  - b. Carilah inspirasi untuk bahan gambar poster yang berkaitan dengan semangat generasi muda dalam upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bidang politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan.
  - c. Mulailah membuat poster dengan melukis gambar yang sesuai dengan tema.
  - d. Tuliskan pesan moral yang ingin disampaikan dalam poster tersebut terkait upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Berilah warna untuk lebih memperindah poster yang dibuat.

## LATIHAN SOAL 2



### Soal Latihan:

#### A. Pilihan Ganda

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda silang (x) pada jawaban yang benar!

1. Pada masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) bentuk negara dan bentuk pemerintahan yang dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah.....
  - a. Demokrasi dan Republik
  - b. Kesatuan dan Republik
  - c. Kesatuan dan monarkhi
  - d. Republik dan kesatuan
  - e. Persatuan dan kesatuan bangsa
2. Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan di Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan belum sepenuhnya terwujud, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal tersebut dikarenakan pemerintah bersama-sama rakyat sedang....
  - a. membentuk lembaga negara secara lengkap sesuai dengan UUD 1945
  - b. mencari format sistem pemerintahan yang akan digunakan
  - c. mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara
  - d. merumuskan kebijakan terkait pembentukan partai politik
  - e. menyusun strategi dalam melaksanakan pemilihan umum
3. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan dengan tujuan menyelamatkan negara kesatuan republik Indonesia dari kekacauan dan perpecahan. Di bawah ini yang bukan merupakan isi dekrit presiden adalah.....
  - a. Pembubaran badan konstituante
  - b. Tidak berkalunya UUDS 1950
  - c. Berlakunya kembali UUD 1945
  - d. Pembentukan DPRS
  - e. Pembentukan MPRS dan DPAS

4. Kegagalan Badan Konstituante dalam menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950 menyebabkan...
  - a. digantinya nama Badan Konstituante
  - b. dibentuknya Dewan Nasional
  - c. dibentuknya MPR
  - d. dikeluarkannya Dekrip Presiden 5 Juli 1959
  - e. dikeluarkannya mosi tidak percaya
5. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 membawa konsekuensi perubahan sistem pemerintahan di Indonesia menjadi....
  - a. Federasi
  - b. Serikat
  - c. Republik
  - d. Presidensiil
  - e. Parlementer
6. Pemilihan umum tahun 1955 diselenggarakan dalam dua tahap yaitu tahap pertama tanggal 29 September 1955 dan tahap kedua tanggal 15 Desember 1955. Tahap pertama dilaksanakan untuk memilih.....
  - a. Anggota DPR
  - b. Anggota MPR
  - c. Anggota Konstituante
  - d. Anggota KNIP
  - e. Anggota Dewan Nasional
7. Berikut ini yang menjadi latar belakang munculnya demokrasi terpimpin pada tahun 1959-1966 di Indonesia adalah ....
  - a. pers dan media massa berpartisipasi dalam menyiarkan informasi
  - b. ditetapkannya Program Pembangunan Lima Tahun
  - c. kabinet sering berganti mengakibatkan pembangunan yang tersendat-sendat
  - d. kesadaran politik dan kehidupan partai kurang berkembang
  - e. diberlakukannya kembali UUDS 1950
8. Dalam sistem parlementer pemerintah (kabinet) sangat tergantung kepada dukungan partai-partai dalam parlemen. Kondisi ini menyebabkan..
  - a. memudahkan koordinasi antar partai politik
  - b. terlaksananya program kerja kabinet dengan baik
  - c. memudahkan mengawasi presiden dalam melaksanakan tugasnya
  - d. kedudukan parlemen menjadi kuat
  - e. terjadinya pergantian kabinet dalam waktu yang cepat

9. Perhatikan pernyataan berikut ini
  - a. Pengangkatan Presiden Seumur Hidup
  - b. Partai politik memegang peranan dalam pemerintahan
  - c. Mengusulkan Prinsip Nasakom
  - d. Presiden sebagai hanya sebatas kepala negara
  - e. MPR tunduk kepada Presiden
  - f. Pembubaran anggota DPR hasil pemilu

Karakteristik demokrasi terpimpin yang dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1959-1965 ditunjukkan pada nomor...

- a. (1), (2), (3), (5)
  - b. (1), (3), (5), (6)
  - c. (1), (3), (4), (5)
  - d. (1), (2), (3), (6)
  - e. (1), (3), (4), (6)
10. Prioritas pembangunan yang dilakukan pada masa pemerintahan orde baru adalah bertumpu pada ....
    - a. pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap
    - b. pembangunan ekonomi dan koperasi
    - c. pembangunan pertahanan dan kemanan
    - d. pembangunan ekonomi dan sosial budaya
    - e. pembangunan nasional dan pertahanan keamanan.

#### B. Soal Uraian

**Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!**

1. Sebutkan 3 semangat persatuan dan kesatuan yang dapat kita teladani dari Peristiwa Kongres Pemuda 28 oktober 1928!
2. Sebutkan 3 sebab dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959! Jelaskan!
3. Sebutkan tiga kelemahan pada masa pelaksanaan pemerintahan Ore baru pada tahun 1966- 1998! Jelaskan!
4. Sebutkan 3 semangat persatuan dan kesatuan yang dapat kita teladani dari dinamimika persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan tahun 1945-1949!
5. Berikan 3 contoh sikap persatuan dan kesatuan yang dapat dilakukan dalam lingkungan masyarakat disekitar kita!

## RANGKUMAN

- Negara pada hakikatnya organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa. Sifat egara adalah memaksa, monopoli, dan mencakup semua.
- Negara dikatakan negara kesatuan apabila memiliki ciri-ciri antara lain: kekuasaan tertinggi ada di Pemerintah Pusat ; konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang beraku di negara hanya satu; tidak mengenal istilah negara bagian (tidak ada negara dalam negara); dan hanya ada satu kebijaksanaan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
- Bentuk negara kesatuan yang dipilih negara Indonesia mendasarkan pada kondisi kewilayahan dan keberagaman bangsa. Karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia dapat dilihat dari Pasal-Pasal UUD NRI 1945 yaitu Pasal 1 yat (1); Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 25A dan pasal 37 ayat (5).
- Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ditunjukkan oleh pemerintah dan seluruh komponen rakyat Indonesia dalam perjuangan melawan penjajah untuk mempertahankan kemerdekaan dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu komitmen persatuan dan kesatuan bangsa terlihat dengan dukungan rakyat terhadap TNI dalam menumpas setiap pemberontakan yang ingin merongrong, memisahkan diri dari NKRI serta membubarkan NKRI.

## KUNCI JAWABAN DAN RUBRIK PENILAIAN

### UNIT 1 IKATAN YANG UTUH

**Rubrik Penilaian Penugasan 1.** Membuat cerita sederhana yang berisi tentang semangat generasi muda dalam upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

No	Aspek yang dinilai	Kriteria Penilaian		Skor
		Kriteria	Nilai	
1	Judul Cerita	Menarik	20	
		Cukup Menarik	15	
		Kurang Menarik	10	
		Tidak Menarik	5	
2	Isi Cerita	Sangat bagus, menggugah kesadaran persatuan dan kesatuan	25	
		Bagus, menggugah kesadaran persatuan dan kesatuan	20	
		Cukup bagus, cukup menggugah kesadaran persatuan dan kesatuan	15	
		Tidak bagus, tidak menggugah kesadaran persatuan dan kesatuan	5	
3	Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar	Sangat bagus, menggunakan bahasa Indonesia baku dan benar serta mudah dipahami	40	
		Bagus, menggunakan bahasa Indonesia baku dan benar serta mudah dipahami	30	
		Cukup bagus, menggunakan bahasa Indonesia baku dan benar serta cukup mudah dipahami	20	
		Kurang bagus, banyak menggunakan bahasa Indonesia tidak baku serta sulit dipahami	10	
4	Kejelasan Pesan yang ingin disampaikan	Mudah dipahami	15	
		Cukup mudah dipahami	5	
<b>JUMLAH SKOR KESELURUHAN</b>				

#### Pilihan Ganda:

- |      |       |
|------|-------|
| 1. b | 6. e  |
| 2. e | 7. c  |
| 3. c | 8. d  |
| 4. d | 9. b  |
| 5. a | 10. a |

### B. Uraian :

No	Jawaban	Skor
1	<b>Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah:</b> Indonesia menganut negara kesatuan dengan asas desentralisasi dengan sistem otonomi daerah. Pemberian otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Ada beberapa urusan pemerintahan yang tidak diberikan kewenangan kepada daerah yaitu, urusan pemerintahan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tetap ada ditangan Pemerintah Pusat.	<p>Jika menjawab benar <b>Nilai 3</b></p> <p>Jika menjawab kurang lengkap <b>Nilai 2</b></p> <p>Jika menjawab tetapi salah <b>Nilai 1</b></p> <p>Jika tidak menjawab <b>Nilai = 0</b></p>
2	<b>Perbedaan antara negara kesatuan dan negara federal:</b>  <b>Negara Kesatuan</b> disebut juga sebagai negara unitaris atau negara tunggal, yang berarti negara yang tidak terdiri dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara sehingga tidak ada negara di dalam negara.  <b>Contoh :</b> Indonesia, Belanda, Jepang  <b>Negara federal</b> adalah negara yang bersusun banyak dimana dalam sebuah negara terdapat negara-negara bagian  <b>Contoh :</b> Amerika Serikat, Malaysia	<p>Jika menjawab dan benar semua <b>Nilai 3</b></p> <p>Jika menjawab keduanya tetapi tidak diberi contoh atau penjelasan kurang tepat <b>Nilai 2</b></p> <p>Jika jawaban salah <b>Nilai 1</b></p> <p>Jika tidak menjawab <b>Nilai 0</b></p>
3	Ciri-ciri negara kesatuan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kekuasaan tertinggi ada di Pemerintah Pusat</li> <li>2. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang berlaku di negara hanya satu</li> <li>3. Tidak mengenal istilah negara bagian (tidak ada negara dalam negara).</li> <li>4. Hanya ada satu kebijaksanaan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.</li> </ol>	<p>Jika menjawab tiga dari jawaban tersebut dan benar semua <b>Nilai 3</b></p> <p>Jika menjawab dua atau satu dari tiga jawaban tersebut dan benar semua <b>Nilai 2</b></p> <p>Jika jawaban salah semua <b>Nilai 1</b></p> <p>Jika tidak menjawab <b>Nilai 0</b></p>

4	3 karakteristik yang terdapat dalam negara kesatuan Republik Indonesia	Jika menjawab tiga dari jawaban tersebut dan benar semua <b>Nilai 3</b>
	1. Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah.	Jika menjawab dua atau satu dari tiga jawaban tersebut dan benar semua <b>Nilai 2</b>
	2. Pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.	Jika jawaban salah semua <b>Nilai 1</b>
	3. Terkait dengan hubungan keuangan, pelayanan umum serta pemanfaatan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras.	Jika tidak menjawab <b>Nilai 0</b>
5	4. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus, bersifat istimewa, maupun kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
	5 Dampak dikeluarkannya Deklarasi Juanda bagi persatuan dan kesatuan Indonesia.  Wilayah Indonesia semakin luas merupakan kesatuan wilayah nusantara dimana laut sebagai pemersatu, bukan sebagai pemisah wilayah. Pulau-pulau menjadi satu kesatuan dalam bingkai NKRI	Jika Jika menjawab benar <b>Nilai 3</b>  Jika menjawab kurang lengkap <b>Nilai 2</b>  Jika menjawab tetapi salah <b>Nilai 1</b>  Jika tidak menjawab <b>Nilai = 0</b>
<b>Nilai = ((Jumlah betul jawaban soal PG) + (Jumlah betul jawaban Uraian)) x 4</b>		

## UNIT 2 : BERSATU ITU INDAH

**Rubrik Penilaian Penugasan 2.** Membuat poster dengan tema persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

No	Aspek yang dinilai	Kriteria Penilaian		Skor
		Kriteria	Nilai	
1	Ide atau Gagasan	Menarik	20	
		Cukup Menarik	15	
		Kurang Menarik	10	
		Tidak Menarik	5	
2	Nilai Persuasif	Sangat bagus, menggugah kesadaran persatuan dan kesatuan	25	
		Bagus, menggugah kesadaran persatuan dan kesatuan	20	
		Cukup bagus, cukup menggugah kesadaran persatuan dan kesatuan	15	
		Tidak bagus, tidak menggugah kesadaran persatuan dan kesatuan	5	
3	Keindahan Grafis	Indah, komposisi warna, huruf dan gambar semuanya sesuai	40	
		Cukup, komposisi warna sesuai, huruf dan gambar cukup sesuai	25	
		Kurang, komposisi warna, huruf dan gambar kurang sesuai	10	
		Tidak Indah, komposisi warna, huruf dan gambar tidaksesuai	5	
4	Pesan yang ingin disampaikan	Mudah dipahami	15	
		Cukup mudah dipahami	5	
<b>JUMLAH SKOR KESELURUHAN</b>				

### A. Pilihan Ganda:

- |      |       |
|------|-------|
| 1. b | 6. e  |
| 2. e | 7. c  |
| 3. c | 8. d  |
| 4. d | 9. b  |
| 5. a | 10. a |

**B. Uraian :**

No	Jawaban	Skor
1	<p>3 semangat persatuan dan kesatuan yang dapat kita teladani dari Peristiwa Konggres Pemuda 28 oktober 1928</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyadari bahwa bangsa Indonesia senasib, sepanggung dengan tujuan yang sama yaitu Indonesia merdeka</li> <li>Munculnya kesadaran tentang kesatuan bangsa, tanah air, dan bahasa yang kemudian akan menjadi dasar perjuangan bangsa Indonesia kedepan dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah.</li> <li>Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan daerah dan suku bangsa.</li> </ol>	<p>Jika menjawab tiga dan benar semua <b>Nilai 3</b></p> <p>Jika menjawab dua atau satu dari tiga jawaban yang diminta dan benar semua <b>Nilai 2</b></p> <p>Jika jawaban salah semua <b>Nilai 1</b></p> <p>Jika tidak menjawab <b>Nilai 0</b></p>
2	<p>3 sebab dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>terjadinya pemberontakan didaerah,</li> <li>kegagalan badan konstituante dalam menjalankan tugasnya,</li> <li>munculnya desakan untuk kembali ke UUD 1945</li> </ol>	<p>Jika menjawab tiga dan benar semua <b>Nilai 3</b></p> <p>Jika menjawab dua atau satu dari tiga jawaban yang diminta dan benar semua <b>Nilai 2</b></p> <p>Jika jawaban salah semua <b>Nilai 1</b></p> <p>Jika tidak menjawab <b>Nilai 0</b></p>
3	<p>tiga kelemahan pada masa pelaksaksanaan pemerintahan Ore baru pada tahun 1966- 1998</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Presiden mempunyai kendali sangat besar terhadap lembaga negara yang lain sehingga memiliki kekuasaan yang tidak terkontrol yang akhirnya menyebabkan</li> <li>munculnya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme;</li> <li>adanya pembatasan hak-hak politik rakyat seperti pembatasan jumlah partai politik, kebebasan pers dikekang;</li> <li>pembangunan ekonomi bersifat sentralistik;</li> <li>supremasi hukum tidak dapat dijalankan dengan baik</li> </ol>	<p>Jika menjawab tiga dan benar semua <b>Nilai 3</b></p> <p>Jika menjawab dua atau satu dari tiga jawaban tersebut dan benar semua <b>Nilai 2</b></p> <p>Jika jawaban salah semua <b>Nilai 1</b></p> <p>Jika tidak menjawab <b>Nilai 0</b></p>

4	<p>3 semangat persatuan dan kesatuan yang dapat kita teladani dari dinamimika persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan tahun 1945-1949</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perjuangan tanpa pamrih untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih dari segala macam bentuk rongrongan baik dari luar maupun dari dalam</li> <li>pantang menyerah dan semangat nasionalisme yang tinggi</li> <li>meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi</li> </ol>	<p>Jika menjawab tiga dan benar semua <b>Nilai 3</b></p> <p>Jika menjawab dua atau satu dari tiga jawaban tersebut dan benar semua <b>Nilai 2</b></p> <p>Jika jawaban salah semua <b>Nilai 1</b></p> <p>Jika tidak menjawab <b>Nilai 0</b></p>
5	<p>3 contoh sikap persatuan dan kesatuan yang dapat dilakukan dalam lingkungan masyarakat disekitar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>membantu dengan ikhlas dan tanpa pamrih tetangga atau oang disekitar kita yang membutuhkan pertolongan</li> <li>Menghormati hak dan kepentingan tetangga atau anggota masyarakat disekitar kita sesuai dengan peraturan yang berlaku</li> <li>Mentaati segala peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat</li> </ol>	<p>Jika menjawab tiga dan benar semua <b>Nilai 3</b></p> <p>Jika menjawab dua atau satu dari tiga jawaban tersebut dan benar semua <b>Nilai 2</b></p> <p>Jika jawaban salah semua <b>Nilai 1</b></p> <p>Jika tidak menjawab <b>Nilai 0</b></p>
<p><b>Nilai = ((Jumlah betul jawaba PG) + (Jumlah betul jawaban Uraian)) x 4</b></p>		

## KRITERIA PINDAH MODUL

- Anda dinyatakan lulus dan dapat mengikuti modul berikutnya dengan ketentuan telah mengikuti tes hasil belajar yang telah disiapkan oleh tutor pendamping dengan penguasaan materi dengan nilai ketuntasan 80.
- Jika penguasaan materi belum mencapai nilai ketuntasan 80 jangan berkecil hati dan tetap semangat. Ulangi lagi dengan membaca kembali uraian materi di atas, kemudian coba lagi untuk mengerjakan soal latihan khususnya pada soal dimana anda menghadapi kesulitan untuk menjawabnya.

## Saran Referensi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## Daftar Pustaka

Ari Tri Soegito. 2016. Pendidikan Pancasila. UNNES Press. Semarang

Busroh, Abu Daud. 2009. Ilmu Negara. Jakarta: Bumi Aksara

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII. Edisi Revisi II.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. Sejarah Indonesia SMA kelas XII.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 Tahun 1998

Miriam Budiardjo, 2010. *Dasar-dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, cet. IV

M. Kusnardi, dan Bintan R. Saragih, 2000. *Ilmu Negara*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.

Soehino. 1998. *Ilmu Negara*. Penerbit Liberty. Yogyakarta.

Sunarto, dkk. 2016. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. UNNES Press. Semarang

### Sumber gambar :

<https://mediaindonesia.com/read/detail/33198-persatuan-bangsa-belajar-dari-sejarah>

<https://indonesia.go.id/archipelago>

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/msp/adenan-kapau-gani-pada-kongres-pemuda-kedua/>

<https://www.elshinta.com/news/184969/2019/08/19/19-agustus-1945-ini-hasil-sidang-ppki>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_legislatif\\_Indonesia\\_1955](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_1955)

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/dekrit-presiden-5-juli-1959/>

<https://www.kompas.com/skola/image/2020/03/12/173000869/kembali-ke-negara-kesatuan>

<https://tirto.id/amandemen-uud-1945-tahun-2002-sejarah-isi-perubahan-keempat-ejLE>

## BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : R. Abdurrahim Abubakar, S.Pd.  
Telp. Kantor/ HP : 082240668066  
E-mail : radenabdurrahim@gmail.com  
Alamat kantor : Jl. Cilengkrang 2 no.7 kec.Cibiru, Kel. Palasari, Kota Bandung

### ***Riwayat Pekerjaan/profesi:***

2017-sekarang: Tutor Paket Mapel PPKN  
2005-2007: Guru Mapel PPKn SMK PELITA Kota Bandung  
2009-2019: Guru Mapel Sosiologi SMA Mekar Arum Kab. Bandung  
2009-Sekarang : Guru Mapel PPKn SMK YASRI Kota Bandung  
2007-Sekarang : Guru Mapel PPKn SMA Muhammadiyah 4 Kota Bandung

### ***Riwayat Pendidikan Tinggi Dan Tahun Belajar***

S1: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2000-2004)

Nama Lengkap : Euis Laelasari, M.M.Pd  
Telp. Kantor/ HP : (022) 2786017/ 081322516501  
E-mail : euisjayagiri@gmail.com  
Alamat kantor : Jl. Jayagiri No. 63 Lembang Bandung

### ***Riwayat Pekerjaan/ profesi dalam 10 tahun terakhir:***

1. 1985 - 1988 : Tenaga Teknis Pamong Belajar di SKB Kabupaten Bekasi
2. 1988 - 1990 : Tenaga Teknis Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BKPB) Jayagiri
3. 1990 – sekarang : Tenaga Fungsional Tertentu (Pamong Belajar) PP PAUD DAN DIK-MAS Jawa Barat
4. 2017- sekarang : Pendidik Paket C Daring PKBM Jayagiri
5. 2018- sekarang: Fasilitator Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan

### ***Riwayat Pendidikan Tinggi Dan Tahun Belajar***

1. Diploma 1 : Pendidikan Luar Sekolah lulus tahun 1985
2. S1 : Pendidikan Luar Sekolah, lulus tahun 1997
3. S2: Pendidikan Luar Sekolah (PLS), lulus tahun 2007